



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**



LAPORAN PENELITIAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGGINYA PARTISIPASI
PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA
TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

PENELITI:

**DARYONO, S.SOS., M.Si., Ph.D
SARIFUDIN, S.SOS., M.Si**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang lebih populer disingkat menjadi Pilkada secara langsung merupakan wujud bagaimana sistem demokrasi beroperasi pada aras lokal di Indonesia. Pilkada langsung kini menjadi sarana sentral dalam proses pendalaman demokrasi (*deepening democracy*), sebab melalui Pilkada secara langsung masyarakat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin daerah, maka secara otomatis akan melembagakan legitimasi kepala daerah, juga mendorong wujudnya akuntabilitas dan responsibilitas kepala daerah sehingga memberi ruang kepada kepala daerah berkesempatan untuk berinovasi, berkarya yang kemudian akan mewarnai kehidupan sosiopolitik, sosiokultur dan sosio ekonomi daerah (Agustino, 2014).

Sejak pertama dilaksanakan pada Tahun 2005, Pilkada berusaha disempurnakan baik dari sisi pengaturan dan penyelenggaraannya agar lebih berkualitas. Salah satu upayanya adalah bagaimana menciptakan Pilkada dengan angka partisipasi yang tinggi sebagai garansi utama legitimasi di samping faktor kontestasi dan kompetisi yang sehat. Dalam perkembangannya, Pilkada kemudian bertransformasi menjadi Pilkada serentak mengikuti dinamika perpolitikan yang terus berkembang. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 9 Desember 2015, hadir sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia, Pilkada Serentak yang memiliki fungsi sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih (*voters turnout*) merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah pemilihan umum. Pada saat sistem pembagian kekuasaan kita telah bertransformasi dari sentralistis ke desentralistis, maka kepala daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat (Riewanto, 2007). Kekuasaan adalah fitur yang sangat problematis, dan yang aktor yang ingin dan berkuasa berusaha mendapatkan persetujuan atas kekuasaannya. Kekuasaan yang diperoleh dan dijalankan sesuai aturan serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat itulah yang disebut legitimasi (Beetham, 1991). Ini artinya, semakin tinggi tingkat pengakuan masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi dalam proses politik maka semakin legitimasi sebuah proses dan hasil Pilkada. Sehingga dapat disimpulkan jika Pemilu atau Pilkada yang memiliki legitimasi tinggi dengan sendirinya akan berdampak pada efektivitas pemerintahan. Secara empiris, tolok ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat diukur menggunakan dua variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih dalam setiap tahapan dan rasionalitas pilihan. Secara substansial, sebuah Pilkada dikatakan berhasil apabila berlangsung dengan damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang, serta terselenggara secara *luber dan jurdil*. Apabila dari segi proses standar-standar normatif tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya dapat mendorong motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi karena ada kepercayaan yang

terbangun. Berkaitan dengan fenomena menurunnya persentase partisipasi pemilih di Indonesia khususnya pada Pilkada serentak.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada pada dasarnya memiliki *positioning* yang krusial, hal ini disebabkan sebuah pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilkada akan berdampak secara politis terhadap legitimasi karena faktor partisipasi publik. Jadi, apabila tingkat partisipasi pada sebuah Pilkada sangatlah rendah atau kurang dari setengah jumlah total pemilih, tentu hasilnya kurang merepresentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, partisipasi sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik suatu pemerintahan. Pada tingkat lanjut, partisipasi pemilih bertransformasi sebagai representasi keterlibatan publik dalam peran untuk menciptakan proses pemilihan umum yang bebas dan adil (*free and fair*) melalui pengawasan aktif terhadap jalannya proses pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam undang-undang. Dalam konteks keterkaitan antara partisipasi dan legitimasi, Pilkada yang memiliki legitimasi tinggi dapat mewujudkan tujuan Pilkada itu sendiri. Secara normatif, baik Pemilu maupun Pilkada memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah: mewujudkan integrasi nasional (*national integration*); menghasilkan pemerintahan efektif (*effective government*); menciptakan kontrol atas pemerintahan yang bertanggung jawab (*control of government*); serta membangun keterwakilan politik (*political representativeness*). Sedangkan efektifitas pemerintahan dicirikan oleh kepercayaan dan tingkat pengakuan yang tinggi dari masyarakat; dan memiliki kinerja baik dan capaian pembangunan riil; terciptanya penegakan hukum; serta mampu menjalankan fungsi legislasi secara produktif (Hertanto, 2017).

Menciptakan pemerintahan berlegitimasi kuat melalui upaya meningkatkan partisipasi publik melalui pemilihan bukanlah hal mudah. Secara normatif beban tanggung jawab mendorong partisipasi publik terhadap pemilihan adalah milik seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), namun kenyataannya, seringkali beban tersebut hanya tertumpu pada penyelenggara Pilkada. Oleh karena itu, KPU di daerah harus membaca situasi ini sebagai sebuah tantangan, apalagi dalam menyelenggarakan setiap tahapan KPU Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran yang memadai. Dalam situasi ideal KPU mungkin tidak menemui banyak kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi, namun dalam situasi khusus seperti Pilkada Serentak Tahun 2020, KPU menghadapi dinamika yang sama sekali berbeda dengan situasi normal sebelumnya. Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi penyelenggara, Pilkada yang diselenggarakan dalam situasi khusus pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara di dunia termasuk Kota Samarinda. Kondisi ini Menyebabkan Pilkada Serentak setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan yang idealnya dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2020 digeser menjadi Rabu, 9 Desember 2020. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda mereda, dari bulan April hingga pertengahan Tahun 2020 jumlah korban yang terinfeksi virus cenderung semakin meningkat. Secara regulatif pemerintah bersama DPR dan KPU pada tanggal 14 April 2020 menyepakati opsi penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 dengan mengamandemen Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. Pada tanggal 4 Mei 2020 keputusan penundaan tersebut kemudian dituangkan pemerintah dalam Perppu No 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Keputusan melaksanakan pemilihan di tengah Pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Efek pada partisipasi Pemilihan umum yang demokratis terbaik, dicirikan dengan partisipasi tinggi dan tingkat partisipasi yang sama berbagai kelompok dalam masyarakat. Mengadakan Pilkada selama pandemi bisa merusak, atau dianggap merusak, aspek demokrasi ini dengan mengurangi jumlah pemilih. Keabsahan kontes mungkin dirusak oleh partisipasi yang tidak merata, hal ini dikarenakan kondisi kesehatan akibat wabah Covid-19. Oleh karena itu, melanjutkan pemilihan umum dapat berpeluang menjadikan Pemilu sebagai proses pemilihan yang kurang inklusif (James, & Garnett, 2019).

Berangkat dari pandangan berbagai organisasi sosial bidang kepemiluan serta berbagai hasil survei yang dilansir baik oleh media maupun lembaga survei, maka dua tantangan terbesar bagi penyelenggara pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pertama adalah menyelenggarakan pemilihan yang aman dan sehat, kedua, mendorong minat dan partisipasi pemilih agar tidak takut dan enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk meraih target angka partisipasi sesuai dengan harapan KPU maka diperlukan strategi dan cara-cara yang efektif.

Tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak pertama Tahun 2015 jumlahnya hanya 70 persen, disusul kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 74, 20 persen, dan pada Pilkada Serentak terakhir Tahun 2018 angka partisipasi kembali mengalami penurunan menjadi 73,24 persen. Sedangkan pada Pilkada Tahun 2020

meningkat menjadi 76,09 %. Adapun untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi rata-rata mencapai 69,67 persen, sementara pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati angka partisipasi pemilih rata-rata mencapai 77,52 persen dan pada pemilihan serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69,04 persen. (Siaran Pers KPU RI, 7 Januari 2021). Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi di tingkat Kota (pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota) pada tingkat terendah 69,04 persen.

Tabel 1.1.
Tingkat Partisipasi Politik berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember 2020 Kalimantan Timur

No.	Kota	Pemilih hadir	Persen
1	Kota Samarinda	301.555	51,84%
2.	Kabupaten Mahakam Ulu	20.870	75.41%
3.	Kabupaten Kutai Timur	154.723	63, 64%
4.	Kota Bontang	87.549	70,78%
5.	Kota Balikpapan	266.536	59.47%
6.	Kabupaten Kutai Barat	81.903	71,14%
7.	Kabupaten Berau	112.156	68,42%
8.	Kabupaten Kutai Kartanegara	278.175	56.67%
9.	Kabupaten Paser	128.787	67,23%

Sumber : Data diolah peneliti dari berbagai sumber

Samarinda sebagai kota penyelenggara Pilkada Serentak pada tahun 2020 di hadapkan pada kondisi yang dilematis karena pandemi yang melanda. Kalimantan Timur tingkat partisipasi pemilih masih rendah dibawah 80 % termasuk Kota Samarinda dengan partisipasi 51,84 %.

Tabel. 1.2
Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput
Dalam Pemilihan Umum di kota Samarinda

No	Pemilu Tahun	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Memilih/golput	
			Orang	%	Orang	%
1	Pileg 2004	404.691	284.948	70.41	119,743	29.59
2	Pilwali 2005	434,257	264,479	60.90	167,778	38.64
3	Pilgub 2007	473,638	328,652	69.39	144,986	30.61
4	Pileg 2009	482,317	313,151	64.93	169,166	35.07
5	Pilwali 2010	509,069	313,885	61.66	195,184	38.34
6	Pilgub 2013	565,677	319,381	56.00	246,296	44.00
7	Pileg 2014	564,517	386,114	68,40	189,114	33.50
8	Pilpres 2014	572.316	375.798	65.66	209.137	36.54
9	Pilwali 2015	582.262	286.276	49.17	295.986	50.83
10	Pilkada serentak 2020	576.981	3015555	51.8	280.158	48,56

Sumber : KPU Kota Samarinda

KPU Kota Samarinda sebagai penyelenggara *event* demokrasi berusaha agar proses demokrasi ini berlangsung lancar dan sukses yang bisa di lihat pada Tabel 1.2 Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 meskipun dihelat pada masa Pandemi Covid-19, justru mengalami kenaikan 2.63% dari Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2015. Tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti lebih mendalam oleh peneliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi Covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi Covid-19.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dalam rangka menghasilkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Walikota dan Wakil Walikota yang akan datang bagi KPU Kota Samarinda dan Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka menghasilkan bahan dalam mengidentifikasi persoalan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah bagi KPU Kota Samarinda dan Pemerintah Daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pemilihan Umum

Secara umum apabila sebuah negara didalamnya terdapat Pemilu sebagai mekanisme untuk mengisi jabatan eksekutif maupun legislatif maka negara tersebut dapat dikatakan demokratis. Namun dalam perkembangan demokrasi yang lebih maju, melihat demokratis tidaknya sebuah negara tidak cukup hanya dengan melihat apakah negara tersebut menerapkan Pemilu atau tidak. Demokrasi bergerak ke arah yang lebih substantif dengan melihat dan perlunya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut, yakni apakah didalam tubuh demokrasi isu-isu substantif seperti kebebasan berpendapat, pers yang tidak dibatasi, tidak adanya kekerasan, maupun jaminan atas hak-hak individu sudah berjalan dengan baik (Schumpeter, 1942). Dalam karyanya, Schumpeter menyatakan bahwa “kehendak rakyat” (termasuk kontrak sosial) tidak bisa diimplementasikan begitu saja. Prosedur-prosedur atau metode berdemokrasi adalah motor penggerak dalam kehidupan politik. Konsep demokrasi Schumpeter disebut juga sebagai demokrasi prosedural karena didalamnya menekankan prosedur. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan harus memenuhi tiga syarat sebagai sistem demokrasi prosedural. Tiga syarat tersebut antara lain; pertama, dalam perebutan jabatan-jabatan pemerintahan terdapat kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu dan atau kelompok (terutama parpol). Kedua, melibatkan sebanyak

mungkin warga dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan sebagai bentuk partisipasi politik melalui Pemilu secara reguler dan adil, di mana tidak ada satupun kelompok yang dikecualikan. Ketiga, integritas kompetisi dan partisipasi politik yang dijamin atas dasar kebebasan sipil dan politik (berbicara, pers, berserikat). Demokrasi elektoral yang dilaksanakan pada Pilkada langsung menjadikan partisipasi politik pemilih sebagai determinan utama. Partisipasi politik dalam konteks Pilkada langsung dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif menentukan keterpilihan pemimpin di daerah. Bentuk partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, menghadiri rapat umum, dan sebagainya (Budiarjo, 2008). Dalam demokrasi elektoral pada umumnya terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara. Artinya ruang partisipasi tersebut tidak hanya menjadi domain instrumen negara semata, yakni level eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Masyarakat pemilih harus menjadi bagian dari proses demokrasi dan mendapat ruang untuk berperan aktif, meskipun belum secara substansial karena keikutsertaan mereka masih hanya sebatas prosedural. Pemilihan langsung adalah anak kandung reformasi. Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah pada Tahun 2004 disahkan yang kemudian diikuti oleh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mencerminkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan di tingkat daerah. Pilkada juga berfungsi sebagai sarana sirkulasi

pergantian kekuasaan di tingkat lokal guna terlaksananya roda pemerintahan di daerah sebagai wujud era desentralisasi. Dengan dipilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara langsung, maka paradigma perpolitikan di daerah berubah total seiring dengan terbukanya ruang partisipasi politik masyarakat yang secara ideal harus terbebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

Dalam konteks Pilkada langsung di Indonesia, determinan keterpilihan seorang kandidat sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi disini dapat dipahami juga sebagai bentuk persetujuan rakyat atas kekuasaan yang diperoleh dari hasil pemilihan. Pemilih memiliki kuasa penuh menentukan pilihannya, mereka dapat secara leluasa memilih pemimpin sesuai dengan kriteria dan preferensi masing-masing. Pada titik ini, KPU sebagai penyelenggara Pilkada memiliki kewajiban menjamin proses perebutan jabatan politik dapat berlangsung secara adil dan terbuka sesuai undang-undang yang berlaku. Mulai dari proses tahapan Pemilihan hingga rekrutmen calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota setiap detailnya harus dapat diakses oleh publik dengan mudah demi menjamin bahwa setiap proses kontestasi berjalan dengan *fair*. Proses kontestasi yang *fair* menjadi modal paling dasar untuk menarik minat setiap lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pilkada secara langsung merupakan proses mekanistik yang berulang sebagai suatu tahapan atau siklus. Sehingga apapun yang terdapat dalam setiap prosesnya adalah sesuatu yang dapat diprediksi (*predictable*) kecuali satu yang tidak dapat dipastikan yaitu hasilnya (*unpredictable*). Oleh karena itu untuk menjamin agar hasilnya tidak dapat

diketahui sebelum kompetisi dijalankan, maka harus ada Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks ini, maka undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah perangkat yang harus dapat menjamin pengisian jabatan politik di daerah mendapatkan legitimasi secara konstitusional. Sedangkan jaminan legitimasi substansial diperoleh dari tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Makna Pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, Pilkada juga berperan sebagai bagian dari proses transformasi politik, masyarakat mengharapkan agar Pilkada dapat menghasilkan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, *legitimate*, peka terhadap kepentingan masyarakat, aspiratif, dan akuntabel (Amirudin dan Bisri, 2006). Jadi, masyarakat di era demokrasi langsung memiliki porsi yang fundamental dalam proses memilih pemimpin. Sangat penting hingga kapanpun membangun kesadaran masyarakat bahwa semakin tinggi turut serta andil masyarakat dalam pemilu akan serta merta mengindikasikan bahwa pembangunan politik telah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pilkada secara langsung, partisipasi dan legitimasi partisipasi pemilih adalah dua hal yang elementer, karena keduanya memiliki dampak politis terhadap kredibilitas sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan ditentukan oleh legitimasi, sehingga legitimasi adalah syarat mutlak secara politis. Jika partisipasi sebuah pemilu dan

Pilkada hanya diikuti oleh separuh atau bahkan kurang dari separuh jumlah pemilih, maka tentu saja legitimasi yang dihasilkan dari pemilihan sangatlah lemah, hal ini dikarenakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Secara sederhana partisipasi politik dapat digambarkan pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di bilik suara saat Pilkada berlangsung. Namun secara substansial, partisipasi politik juga mengarah kepada soal bagaimana publik turut serta menciptakan proses pemilihan yang bersih, kredibel serta melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilihan sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan itu sendiri.

Pemilihan umum yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Aktivitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari aktivitas antara lain:

- (a) Pemungutan suara
- (b) Aktivitas diskusi politik
- (c) Kegiatan kampanye
- (d) Aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan
- (e) Komunikasi individu dengan pejabat politik.

2.2 Partisipasi Politik

Salah satu teka-teki untuk mempelajari atau penelitian politik dan lebih khusus lagi perilaku politik adalah rendahnya tingkat partisipasi politik oleh banyak segmen masyarakat di seluruh dunia. Indonesia telah mengalami tingkat partisipasi

pemilih yang lebih rendah dalam beberapa dekade terakhir dibandingkan sebelumnya. Namun, pemungutan suara bukanlah satu-satunya jenis partisipasi yang mengalami penurunan di Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia telah mengalami modernisasi dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pola partisipasi serupa ini terlihat jelas. Karena itu, para peneliti berupaya menyelidiki berbagai pertanyaan terkait partisipasi. Pertanyaan terkait karakteristik tertentu yang mungkin dimiliki individu atau kelompok individu. Tidak hanya karakteristik sosial yang unik dianalisis tetapi apakah karakteristik tersebut membantu memprediksi perilaku politik atau tidak telah dipelajari juga. Pertanyaan yang menanyakan "siapa yang memberikan suara" atau "siapa yang berpartisipasi", Mengapa individu berpartisipasi? Mengapa mereka berpartisipasi dengan cara tertentu dan tidak dengan cara lain? untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS).

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun di mobilisasi. Di sisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta Secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilihat dalam kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik/kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah ataupun juga bisa sebagai anggota parlemen (Budiarjo dalam Sitipu, 2012: 92-93)

Pergi ke tempat pemungutan suara dan memilih seorang kandidat calon walikota yang ingin dipilih dalam jabatan atau latar belakang tertentu jelas dipengaruhi oleh lebih dari jenis karakteristik struktural pemilihan yang ada dalam masyarakat tertentu. Indonesia menetapkan persyaratan usia 17 Tahun minimum untuk hak memilih, tidak semua pemuda dan atau masyarakat berpartisipasi dalam proses pemilihan. Berbagai sikap, nilai, motivasi, dan latar belakang memengaruhi partisipasi. Ini bisa berlaku ketika hanya memilih dan mendaftar untuk memberikan suara, benar-benar memberikan suara dalam pemilihan, atau berpartisipasi dalam demonstrasi politik

Pemungutan suara hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik dan berbeda dari semua jenis partisipasi lainnya. Mereka yang hidup dalam Negara yang stabil. Demokrasi sering secara otomatis menyamakan pemilihan, kampanye, dan pemungutan suara dengan "partisipasi". Orang-orang di dunia terbiasa menerima pidato publik, boikot, dan membujuk orang lain untuk memberikan suara dengan cara tertentu sebagai jenis partisipasi politik. Secara umum, meskipun mereka yang berada di negara demokrasi mungkin memandang pemungutan suara sebagai ukuran utama untuk mengakses partisipasi, kita harus ingat bahwa partisipasi sebagai suatu variabel dapat mencakup tindakan lain. (Denton,2016:4)

2.2.1 Model Partisipasi Politik

Model partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu model konvensional (*conventional model*) dan model bukan konvensional (*non conventional model*).

Model konvensional partisipasi politik adalah model yang paling dominan dalam budaya politik sebagai bentuk yang sudah disepakati dan berkaitan erat dengan aktivitas institusional. Namun model partisipasi politik yang menganut model tidak konvensional adalah partisipasi politik yang hanya ditentukan oleh rejim yang berkuasa dalam menentukan partai atau pemimpin yang dipilih. Masyarakat kurang terlibat dalam proses politik dalam konteks ini partisipasi masyarakat hanya dalam bentuk ikut serta dalam kegiatan politik melalui media massa seperti TV, koran, dan sebagainya. Peran masyarakat tidak diberikan sepenuhnya sehingga masyarakat kurang terlibat dalam proses pemilihan umum (Conway, 1991).

Model kedua tentu bertentangan dengan makna partisipasi politik itu sendiri karena pada dasarnya partisipasi politik memerlukan peran sosial masyarakat yang semakin tahu tentang politik. Milbrath dan Goel, (1977) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah peran sosial masyarakat yang semakin memahami politik, dan mereka yang secara individual termasuk dalam masyarakat terdidik serta memiliki keterampilan demokratis (Pateman, 1970). Semakin banyak individu berpartisipasi dalam politik, maka semakin baik perhatian mereka untuk ikut terlibat dalam partisipasi politik.

Dengan melakukan cara tersebut maka tercipta sebuah masyarakat yang memiliki kepedulian dalam politik, berpartisipasi juga dalam pengambilan keputusan meskipun dalam hal di luar keputusan politik. Oleh sebab itu pemberian keterampilan dalam politik menjadi salah satu model untuk meningkatkan partisipasi politik (Almond and Verba, 1963). Pendek kata, partisipasi adalah *breeds participation* (Mason, 1982).

Model partisipasi politik konvensional merupakan salah satu model partisipasi politik yang sangat menentukan sebuah sistem demokrasi yang stabil. Meskipun tentu perlu dicatat bahwa partisipasi politik yang dilakukan misalnya; pemungutan suara (*voting*) bukanlah hanya satu-satunya bentuk perilaku individu atau kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyalurkan aspirasi politik atau hak politik mereka. Sebab jika partisipasi masyarakat yang nampak hanya sebagai peserta pemilu tetapi tidak mampu memberikan saran atau masukan kepada pemerintah atau partai politik/ atau ikut terlibat sebagai tim pemantau (*controller*) sebetulnya kegiatan mereka bukan disebut ikut aktif berpartisipasi dalam politik melainkan hanya sebagai pengawas pemilu. Namun, jika mereka selain sebagai pemantau atau pengawas pemilu, mereka juga turut melakukan pemungutan suara dan ikut serta dalam menentukan atau mengikuti proses penetapan keputusan dan ikut dalam memberikan saran-saran pemikiran kepada pemerintah (Parry, Moyser, dan Day, 1992). Perilaku masyarakat atau individu dalam kelompok masyarakat nampak dari beberapa kegiatan, antara lain; melakukan kontrak politik individu dengan politisi, pemerintah atau pejabat pemerintah kota, dan organisasi, mengajukan surat keberatan kepada pejabat pelaksana pemilihan umum bahkan

sampai pada proses penegakan hukum/ terlibat dalam kampanye pemilihan dengan cara memakai dan mendistribusikan kelengkapan kampanye misalnya; mendistribusikan stiker dan poster serta ikut berkontribusi dalam bentuk dana (uang) kepada para elit politik yang disukai oleh pemilih sesuai dengan harapan masyarakat dan kepentingan yang dapat dipenuhi jika terpilih. Sedangkan model non konvensional (tidak konvensional) diwujudkan dalam bentuk tindakan yang kurang memberikan perhatian atau bersikap acuh dalam pelaksanaan pemilihan umum (misalnya; hanya ikut menyaksikan melalui media massa) dan mereka tidak ingin terlibat dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi selama penyelenggaraan konsolidasi partai dan pelaksanaan demokrasi (Valionios, 2000; 2001).

Analisis yang paling komprehensif mengenai model partisipasi politik masyarakat menurut Imbrasaite (2010) hampir mirip dengan yang dikemukakan Verba dan Almond (1995) yaitu terdapat beberapa indikator untuk mengukur partisipasi politik masyarakat secara konvensional antara lain:

- a. Melakukan *voting* atau pemungutan suara
- b. Melakukan kontrak politik
- c. Terlibat dalam kampanye pada saat pemilihan.

Sedangkan untuk model bukan konvensional (non konvensional) nampak dari perilaku atau aktivitas individu atau kelompok, yaitu :

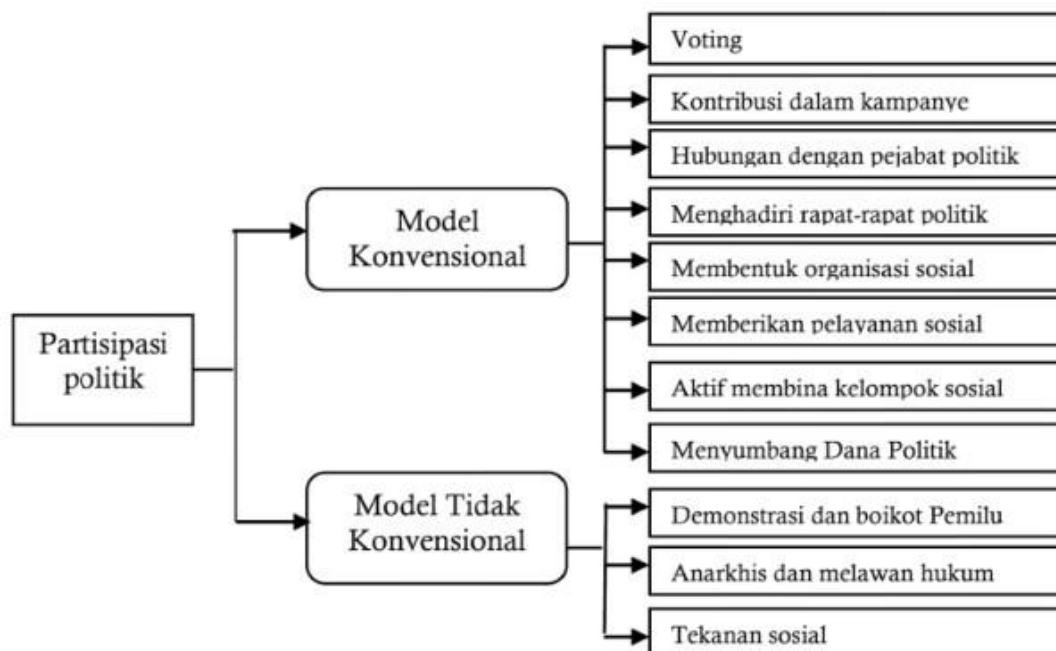
- a. Perilaku partisipasi politik masyarakat melalui proses boikot, demonstrasi
- b. Protes kepada pemerintah dan pelaksana pemilihan umum.

Perilaku ini disebabkan karena munculnya fenomena ketidakpuasan dari masyarakat dari proses penyelenggaraan pemilihan dan bahkan dari awal penentuan calon. Penyebab yang paling utama adalah karena dominannya kekuasaan pemerintah atau partai dalam menentukan calon atau pejabat yang dipilih. Penyebab lain adalah proses rekrutmen calon dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak sesuai dengan dasar hukum atau peraturan yang berlaku. Rasa tidak puas dari sekelompok masyarakat atau individu yang tergabung dalam sebuah aksi dan cenderung anarkis. Model ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan. Model non konvensional dalam partisipasi politik ini sering tidak terkontrol dan tidak sesuai norma atau budaya yang berkembang dalam masyarakat karena cenderung melawan sistem dan struktur sosiopolitik (Kaase dan March, 1979).

Model partisipasi politik yang dikemukakan Verba et al (1995) paling banyak digunakan oleh para peneliti dan pakar partisipasi politik mengatakan bahwa dalam sistem, politik dikatakan seseorang yang berkemauan untuk ikut serta terlibat secara langsung dalam kegiatan politik dapat dilakukan dari beberapa cara atau dapat diidentifikasi dari tipe atau model perilakunya. Verba, et al (1995) mengajukan beberapa rangkaian perilaku atau aktivitas publik Amerika untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dilihat dari beberapa tipe yaitu:

- 1) Melakukan pemungutan suara (voting)
- 2) Bekerja dan berkontribusi dalam kampanye pemilihan umum electoral dan giat dalam organisasi politik

- 3) Melakukan kontak (menjalin hubungan) dengan pejabat politik
- 4) Menghadiri rapat atau pertemuan yang bersifat politik
- 5) Membentuk organisasi kerja sama sosial
- 6) Memberikan pelayanan tanpa harus mengharapkan imbalan (insentif) dalam kegiatan pemilihan lokal dan komite pelaksana pemilihan umum
- 7) Aktif dalam kegiatan politik dengan melakukan mediasi kepada kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan/ dan
- 8) Memberikan kontribusi dalam bentuk dana untuk meningkatkan respons politik masyarakat untuk memenangkan salah satu kandidat yang mereka sukai model partisipasi politik yang dikemukakan Verba et al (1995) dapat digambarkan sebagai berikut:

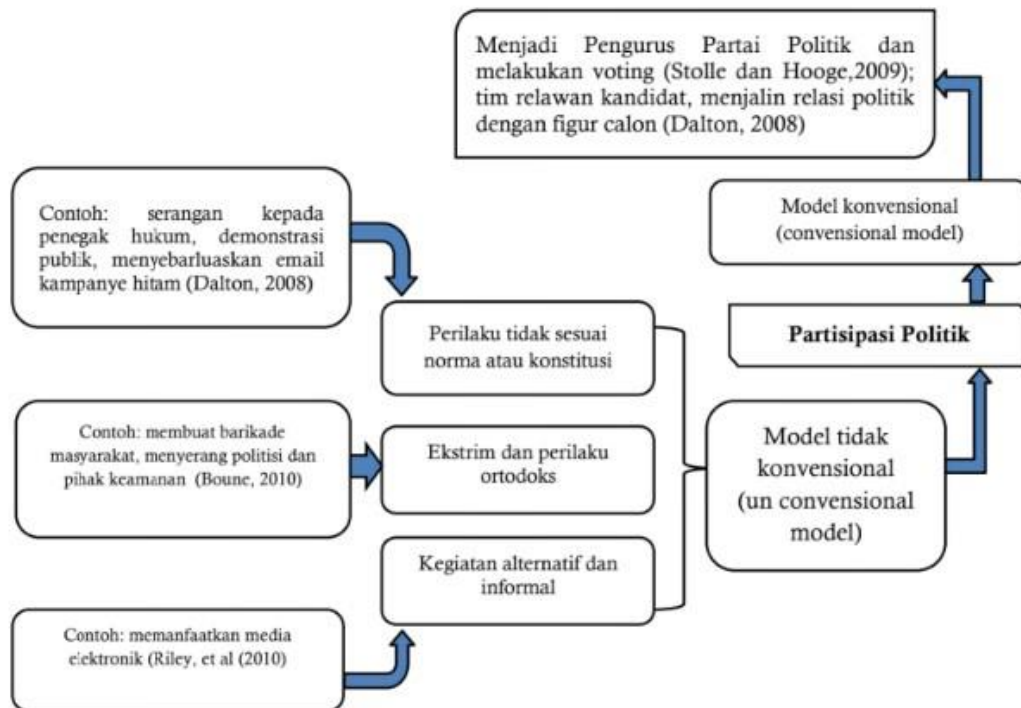


Gambar 2.1. Model Partisipasi Politik (Verba, Nie, Brady,1995)

Model partisipasi politik konvensional lebih terstruktur dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku (Henn dan Foard/ 2012). Lebih lanjut dikemukakan bahwa partisipasi politik konvensional ini meliputi; menjadi anggota partai politik melakukan *voting*, lobi-lobi, kampanye, menghadiri pertemuan-pertemuan politik, melakukan relasi dengan pejabat politik dan sebagainya. Dalam konteks ini menurut Henti dan Foard bahwa secara intrinsik dapat mempererat hubungan dengan institusi politik, misalnya membangun hubungan formal dengan partai politik.

Di Indonesia menurut hemat penulis partisipasi politik lebih umum menggunakan model konvensional dan nampaknya model ini yang sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang telah ditetapkan pemerintah sejak pemilihan pertama tahun 1971 sampai dengan saat ini. Memang tidak bisa dihindari bahwa ada kecenderungan terjadinya praksis dalam perhelatan pemilihan umum. Ada pihak-pihak minoritas yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, namun di Indonesia lebih ditunjukkan dengan perilaku tidak memilih atau golongan putih. Demonstrasi atau anarkisme yang berlebihan dan berujung pada pembunuhan atau bentrok sosial kurang terjadi secara masif bahkan cenderung tidak sampai berakibat gagalnya pemilihan umum. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan akademisi sebagian besar menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia berlangsung dengan lancar, dan sangat jarang terjadi penghentian pemilihan umum dan terjadi *vacuum of power* dalam sejarah

perpolitikan di Indonesia. Lamprinou (2013) mengajukan model partisipasi politik melalui hasil penelitiannya sebagai berikut:



Tingkat partisipasi masyarakat dalam satu negara berbeda dengan negara lainnya dengan kata lain tidak semua warga negara ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kemudian yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seorang terhadap pemerintah. Berdasarkan tinggi-rendah kedua faktor tersebut, Jeffrey M. Paige memberikan model partisipasi menjadi empat tipe:

1. Partisipasi aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif.
2. Partisipasi apatis, kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif, hal mana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).
3. Militan (radikal). Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan radikal.
4. Partisipasi pasif, kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).(Efriza:2012).

2.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik terhadap pemerintah. Maksudnya ialah kesadaran hak dan kewajiban seorang warga Negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dll. Kedua, mengenai bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan itu sendiri (Rush dan Althoff, 2001:124). Sedangkan menurut Weimer dalam Efriza (2012:152) setidaknya ada lima penyebab faktor– faktor yang memengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi.

Modernisasi di segala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

2. Terjadinya perubahan – perubahan struktur kelas sosial.

Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa.

Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarkan seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide – ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik.

Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa,

dengan menyuarakan ide – ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak- hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu- isu kebebasan pers.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Miriam Budiardjo dalam Suriyanto (2018:27) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi.
2. Faktor politik. Peran serta politik masyarakat didasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:
 - 1) Komunikasi Politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

- 2) Kesadaran politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
 - 3) Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
 - 4) Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*.
3. Faktor fisik individu dan lingkungan faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya
 4. Faktor nilai budaya. Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakikatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradapan masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut

persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik. Berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Tato Pribadi, tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik. Ketiga faktor tersebut memperlancar atau menghambat berlangsungnya kegiatan partisipasi politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Analisis data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis berdasarkan fenomena dan fakta yang ditemukan di lapangan. Namun untuk memaksimalkan analisis data, penelitian ini mengkombinasikan dua metode analisis kualitatif yaitu analisis interaktif dan analisis jejaring. Analisis interaktif mengacu konsep (Miles & Huberman, 1992) dengan melalui empat tahap analisis, yakni: *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Untuk memperkuat analisis interaktif, peneliti mengadopsi konsep Maleong, untuk melihat standar derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian sehingga harus dilakukan pemeriksaan data melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperkuat dengan data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan berupa Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan pemerintah Pengganti Undang

Undang (PERPU), Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah

2. Hasil atau *progress report* pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda tahun 2020
3. Hasil perubahan dan program kerja Komisi Pemilihan Umum.

Sementara data primer diperoleh dari sumber data baik informan kunci maupun informan penelitian sebagai berikut:

No	Sumber Data	Jumlah
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	1 orang
2	KPU Kota Samarinda	3 orang
3	PPK	4 orang
4	PPS	4 orang
5	Pemerintah (KesbangPol)	2 orang
6	Kandidat/ Calon Peserta Pilkada Dan Tim pemenangan	4 orang
7	Masyarakat	100 orang
Total		118 orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Dokumen penelitian untuk mendapatkan data-data berupa dokumen yang berhubungan dengan dasar hukum dan semua peraturan yang berhubungan dengan Partisipasi Politik
2. Wawancara dengan Informan Kunci
3. Wawancara dengan informan

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambar fenomena – fenomena yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan masalah peneliti.

Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan kriteria dan jenis responden. Tujuan utama dari analisis data ini adalah menemukan teori atau penjelasan mengenai pola hubungan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menyampaikan antara gejala atau peristiwa yang diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta faktor – faktor tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan di tengah pandemi di Kota Samarinda dan Strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (*interactive model analysis*) yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. (2014:14)

1. Pengumpulan Data

Yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah di sortir atau di periksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan membuat sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyusun informasi dengan cara tertentu, sehingga diperlukan atau memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan, penyajian data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan disini hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan – catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta bertukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya – upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna – makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya,

dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita – cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran umum Kota Samarinda

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 km² dan terletak antara 117⁰03'00" Bujur Timur dan 117⁰18"14" Bujur Timur serta diantara 00⁰19'02" Lintang Selatan dan 00⁰42'34" Lintang Selatan.

Sejak akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di kota Samarinda sebanyak 59 Kelurahan. Letak, batas dan luas kota Samarinda dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4.1**LETAK BATAS DAN LUAS KOTA SAMARINDA**

1. Letak	Antara	117 ⁰ 03'00"	Bujur Timur
		117 ⁰ 18'14"	Bujur Timur
		00 ⁰ 19'02"	Lintang Selatan
		00 ⁰ 42'34"	Lintang Selatan
2. Batas	Utara	Kabupaten Kutai Kartanegara	
	Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	
	Selatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	
	Barat	Kabupaten Kutai Kartanegara	
3. Luas		718,00 Km ²	

Sumber : <https://samarindakota.go.id>

Luas wilayah kota Samarinda menurut data di kantor kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL 4.2

LUAS WILAYAH KOTA SAMARINDA

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)
1.	Palaran	1. Handil Bhakti	72
		2. Simpang Pasir	44
		3. Rawa Makmur	11
		4. Bukuan	27,2
		5. Bantuas	65
2.	Samarinda Ilir	1. Selili	1,49
		2. Sungai Dama	2,5
		3. Sidodamai	2,87
		4. Sidomulyo	1,94
		5. Pelita	8,92
3.	Samarinda Kota	1. Bugis	7,5
		2. Pasar Pagi	53
		3. Pelabuhan	72
		4. Sungai Pinang Luar	1

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)
		5. Karang Mumus	1
4.	Sambutan	1. Pulau Atas 2. Sindang Sari 3. Makroman 4. Sambutan 5. Sungai Kapih	30 4,5 32 30 17,50
5.	Samarinda Seberang	1. Mesjid 2. Baqa 3. Sungai Keledang 4. Gunung Panjang 5. Tenun Samarinda 6. Mangkupalas	58 2,31 7,65 3,03 0,2935 1,935
6.	Loa Janan Ilir	1. Sengkotek 2. Simpang tiga 3. Tani Aman 4. Harapan Baru 5. Rapak Dalam	4,95 4,21 3,92 6,33 6,72
7.	Sungai Kunjang	1. Loa Buah	16

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
		2. Loa Bakung 3. Teluk Lerong Ulu 4. Lok Bahu 5. Karang Asam Ulu 6. Karang Asam Ilir 7. Karang Anyar	16,59 1,20 2,5 2515 1,29 1,39
8.	Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir 2. Jawa 3. Dadi Mulya 4. Sidodadi 5. Gunung Kelua 6. Air Hitam 7. Air Putih 8. Bukit Pinang	68 11,4 2,87 2,378 1,19 26,03 2,0 196,87
9.	Samarinda Utara	1. Lempake 2. Sempaja Selatan 3. Sungai Siring 4. Tanah Merah 5. Sempaja Utara	32,24 13 75,83 21,56 45

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
		6. Sempaja Barat	19,35
		7. Sempaja Timur	15,29
		8. Budaya Pampang	38
10.	Sungai Pinang	1. Temindung Permai	131
		2. Bandara	51
		3. Sungai Pinang Dalam	8,97
		4. Mugirejo	10,83
		5. Gunung Lingai	4

Dilihat dari tabel-tabel di atas, nampak bahwa kota Samarinda tidak bersinggungan secara langsung dengan laut, karena di dalam wilayah kota Samarinda tidak terdapat laut. Namun demikian Sungai Mahakam yang ada di Kota Samarinda terhubung dengan laut melalui daerah tetangga, yaitu daerah Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur dan Balikpapan.

Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kota Samarinda yang beriklim tropis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2012, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 28,00^C. Suhu udara terendah 23,90^C terjadi pada bulan Januari dan tertinggi 32,90^C pada bulan September.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 Jumlah penduduk Kota Samarinda pada bulan September 2020 menurut hasil SP 2020 adalah sebanyak 827.994 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2020 sebesar 1,26 persen per tahun. Kota Samarinda masih dalam masa bonus demografi karena 70,91 persen penduduknya masih berada di usia produktif (15-64 tahun). Persentase penduduk lansia (65 tahun keatas) Kota Samarinda adalah sebesar 3,57 persen. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,26.

TABEL 4.2

JUMLAH PENDUDUK KOTA SAMARINDA SENSUS TAHUN 2020

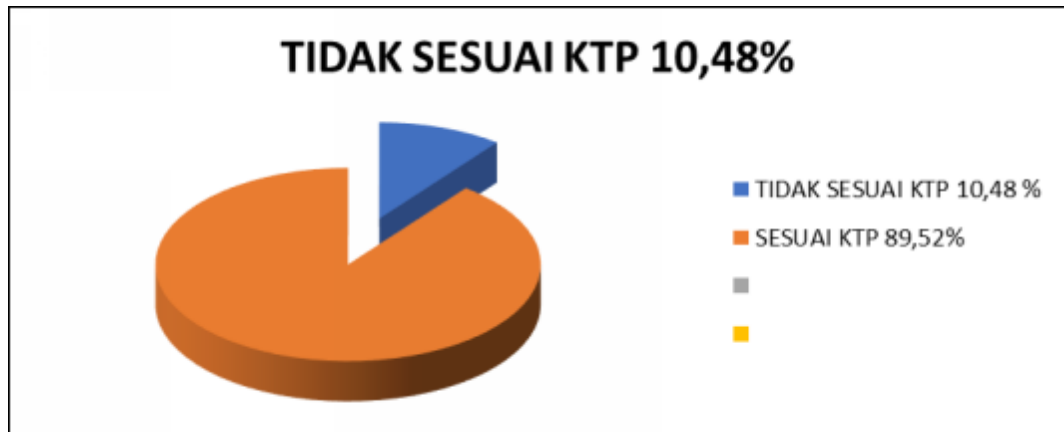
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI LAKI	422.624
2	PEREMPUAN	405.370
TOTAL		827.994

Sumber BPS Kota Samarinda

Dari 827,994 ribu penduduk Samarinda sejumlah 89,52 persen atau sekitar 741.222 penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara 10,48 persen atau sekitar 86.772 penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP (Gambar 4.1). Jumlah ini sebagai indikasi banyaknya penduduk yang bermigrasi dari SLS tempat tinggal mereka sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK/KTP lagi.

Gambar Grafik 4.1

Data Kesesuaian alamat dan KTP Kota Samarinda



Sumber Data BPS Kota Samarinda

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020. Pilkada serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Samarinda secara langsung dan demokratis, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pilkada Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pilkada Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di tengah merebaknya pandemi COVID-19 memang tidaklah mudah. KPU harus menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta menjaga pemilih demi meminimalisir penyebaran virus COVID- 19 ini.

4.2.2 Proses Kegiatan Pilkada Serentak Walikota dan wakil walikota Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

4.2.2.1. Sosialisasi kepada masyarakat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, KPU Kota Samarinda merencanakan beberapa program kegiatan untuk memberikan pendidikan Pilkada dan pelaksanaan sosialisasi Pilkada kepada kepada masyarakat. Dalam proses penyusunan anggaran, sebelum terjadinya bencana Pandemi Covid-19, KPU Kota Samarinda telah merencanakan beberapa program unggulan khususnya pada kegiatan sosialisasi.

Setelah terjadinya Pandemi Covid-19 kegiatan tahapan dihentikan untuk sementara waktu, kemudian dilanjutkan lagi dimasa pandemi covid-19 pada proses inilah beberapa program yang telah tersusun sebelumnya mengalami perubahan berdasarkan arahan perundang-undangan yang berlaku, dan menyesuaikan dengan protokol Covid-19.

Bentuk dan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan kegiatan sosialisasi adalah:

1. Sosialisasi Pilkada melalui program relawan demokrasi yang dilaksanakan oleh 10 Basis Pemilih dan masing-masing basis pemilih menyusun dan melaksanakan kegiatan inti, kegiatan kreatifitas dan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama.
2. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dalam bentuk tatap muka.
3. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode Lomba, yaitu lomba mural, lomba cerdas cermat Daring dan lomba
4. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan mengikuti Pameran ekspo Kaltim 2020.
5. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode Daring
6. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda melalui media Televisi, Radio, dan media cetak.
7. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode peluncuran aplikasi sosialisasi Si Waksut.
8. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode pemasangan Baleho pada titik-titik strategis dalam kota.
9. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode pengadaan Souvenir, berupa Boneka Si Waksut (Maskot), Baju Kaos, payung, cangkir, gantungan kunci, PIN, pulpen, jam dinding.

10. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode mencetak dan membagikan Brosur, leaflet.

11. H-1 Pemungutan suara melaksanakan sosialisasi mobile keliling kota.

4.2.2.2. Pembentukan dan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS, dan KPPS

Guna keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 KPU Kota Samarinda membentuk PPK, PPS Dan KPPS. Hasil yang dicapai dalam tahapan ini adalah terbentuknya seluruh PPK, PPS dan kesekretariatnya serta KPPS sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, dan pembentukannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun jumlah personil PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) TPS se-kota samarinda adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. PPK	5 Orang x 10 Kec	:	50	Orang
2. Sekretariat PPK	3 Orang x 10 Kec	:	30	Orang
3. PPS	3 Orang x 59 kel	:	177	Orang
4. Sekretariat PPS	3 Orang x 59 kel	:	177	Orang
5. KPPS	7 Orang x 1882 TPS	:	13.174	Orang
6. Petugas Kamtib TPS	2 Orang x 1882 TPS	:	3.764	Orang

Kegiatan Penyuluhan/Bimbingan teknis dilaksanakan sesuai kebutuhan tahapan Pilkada, sebagaimana substansi dari kegiatan itu sendiri, KPU Kota Samarinda dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, mengacu pada Juknis dan juga berdasarkan pembekalan yang dilaksanakan secara berjenjang. Bentuk dan Jenis Kegiatan yang telah Dilaksanakan adalah :

1. Rapat Kerja dan Orientasi tugas PPK dan PPS yang dilaksanakan setelah pelantikan

2. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tatap muka pada tahapan Pemutakhiran data pemilih
3. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tatap muka pada tahapan Penyerahan dukungan calon perseorangan
4. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tatap muka persiapan tata cara penyelesaian sengketa hukum
5. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tatap muka pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.
6. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tatap muka pada tahapan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
7. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tatap muka kepada Sekretariat PPK dan PPS tentang pertanggungjawaban jawaban keuangan..
8. Supervisi pelaksanaan Bimbingan Teknis di tingkat PPS dan KPPS oleh PPK se Kota Samarinda.

4.2.2.3. Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Kegiatan tahapan kampanye dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2020. Sebelum mulai tahapan kampanye KPU Kota Samarinda melaksanakan persiapan yaitu melakukan sosialisasi persiapan tahapan kampanye dengan mengundang LO bakal pasangan calon dan partai pengusul dan pemerintah terkait, Menghadiri Bimtek Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur. Dan melakukan

Rapat Koordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon Peserta Pilkada dan instansi terkait.

4.2.3. Data Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2020 Kota Samarinda

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda di peroleh data pemilih tetap sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2020

No	Kelurahan	JUMLAH DPT			TPS
		L	P	Jml	
1	LOA JANAN ILIR	24.128	23.165	47.293	156
2	PALARAN	22.490	21.165	43.655	135
3	SAMBUTAN	19.733	19.090	38.823	122
4	SAMARINDA ILIR	25.940	24.919	50.859	167
5	SAMARINDA KOTA	12.470	12.402	24.872	86
6	SAMARINDA SEBERANG	23.209	22.206	45.415	150
7	SAMARINDA ULU	48.049	46.926	94.975	346
8	SAMARINDA UTARA	35.743	33.686	69.429	234
9	SUNGAI KUNJANG	44.852	43.499	88.351	310
10	SUNGAI PINANG	36.959	36.350	73.309	256
TOTAL		293.573	283.408	576.981	1.962

4.2.3.2 Hasil Rekapitulasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Kota Samarinda

Tabel 4.4

Data Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Tahun 2020

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH
1. Muhammad Barkati Muhammad Darlis	83.243
2. Dr. H. Andi Harun Dr. H. Rusmadi	102.592
3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si H. Sarwono, SP, MM	98.245
Jumlah Suara Sah	284.080
Jumlah Suara Tidak Sah	17.475
Jumlah Suara Sah dan suara Tidak Sah	301.555

Sumber KPU Kota Samarinda Pilkada Tahun 2020

Setelah dilaksanakan Pilkada Serentak Kota Samarinda pada 09 Desember 2020 didapat hasil sebagai berikut :

- Pasangan calon Walikota H. M. Barkati dan bakal Calon Wakil Walikota H.M.Darlis Dengan nomor urut I (satu) memperoleh suara 83.243.
 - Pasangan Calon Walikota Dr. H. Andi Harun dan bakal Calon Wakil Walikota Dr.H.Rusmadi dengan nomor urut 2(dua) memperoleh suara 102.592.
 - Pasangan Calon Walikota Dr.Ir.H.Zairin Zin dan bakal calon Wakil Walikota H.Sarwono,S.P,M.M dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh suara 98.245.
- (Data lebih rinci terlampir).

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kota samarinda masih memiliki kelemahan yaitu partisipasi pemilih hanya 51,86 %.

Data ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Pilkada Kota Samarinda Pada Tahun 2015. Dimana pada Tahun 2015 Jumlah Partisipasi pemilih hanya 49,17 %.

Tabel 4.5
Data Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih,
Tidak Menggunakan Hak Pilih Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Golput	Prosentase
1	Loa Janan Ilir	42,266	19,893	22,373	47/53
2	Palaran	40,056	20,555	19,501	51/49
3	Smd. Seberang	46,717	20,166	26,551	43/57
4	Sungai Kunjang	91,434	37,404	54,030	41/59
5	Samarinda Ulu	99,339	48,483	50,856	49/51
6	Samarinda Kota	26,757	12,971	13,786	48/52
7	Samarinda Utara	70,056	36,356	33,700	52/48
8	Sungai Pinang	78,191	37,404	40,787	48/52
9	Samarinda Ilir	54,210	28,375	25,835	52/48
10	Sambutan	33,236	19,172	14,064	58/42
TOTAL		582,262	207,444	374,818	49/51

Sumber KPU Kota Samarinda Pilkada Tahun 2015

Tabel 4.6
Data Jumlah Pengguna Hak Pilih, DPT dan DPTb
Pada Pilkada Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda
Tahun 2020

No	Kecamatan	Pengguna Hak Pilih	DPT	DPTb
1	Loa Janan Ilir	21622	47293	390
2	Palaran	23763	43655	169
3	Samarinda Ilir	27541	50859	305
4	Samarinda Kota	12060	24872	90
5	Samarinda Seberang	23052	45415	518
6	Samarinda Ulu	49912	94975	608
7	Samarinda Utara	39389	69429	832
8	Sambutan	21524	38823	221
9	Sungai Kunjang	43918	88351	913
10	Sungai Pinang	38774	73309	686
Kota Samarinda		301555	576981	4732

Sumber KPU Kota Samarinda Pilkada Tahun 2020

Tabel 4.7

Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Pemilih yang tidak Menggunakan Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Total Jumlah Pemilih	Total Jumlah Pemilih	Prosentase
	582,262	
Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih	Total Pemilih	
	286,276	49.17 %
Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Total Pemilih	
	295.986	50.83 %
Jumlah Suara Sah	Total Pemilih	
	274,067	96.94%

Suara tidak sah	Total Suara Tidak Sah	
	12,209	3.26%

Sumber KPU Kota Samarinda 2015

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Pemilih pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian kelapangan yang dilakukan peneliti di dapat beberapa hasil, yaitu:

1. Wawancara dengan KPU Propinsi Kalimantan Timur

Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom Komisioner KPU Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda merupakan salah satu dari 9 Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Meski dalam masa Pandemi Covid-19 Samarinda kenaikan jumlah partisipasi pemilih sebanyak 2 %. Pada Pilkada Tahun 2015 jumlah Partisipasi pemilih sebesar 49,17 % sedangkan pada Pilkada Tahun 2020 ini jumlah Partisipasi pemilih meningkat menjadi 51,86 %. Jumlah partisipasi pemilih bukan satu satunya faktor suksesnya pelaksanaan Pilkada. pelaksanaan Pilkada yang berlangsung lancar, aman dan damai juga merupakan salah satu indikasi keberhasilan sebuah Pilkada.

2. Wawancara dengan KPU Kota Samarinda

Dwi Haryono, Najib, dan Nina Mawaddah. KPU Kota Samarinda sudah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih walaupun tidak sepenuhnya

dapat memenuhi target KPU RI 70 % namun bila flashback melihat Pilkada 2015 Pilkada Serentak Tahun 2020 ini mengalami kemajuan angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan meskipun tidak banyak. Jika pada Pilkada di Tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih 49,17 % pada Pilkada Serentak kota Samarinda Tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat partisipasi pemilih ke angka 51,86 %. Dalam pelaksanaan sebuah pesta demokrasi suksesnya itu tidak hanya dilihat dari satu sisi melainkan ada beberapa sisi indikator dan parameter yang menjadi bagian penting dalam suksesnya pesta demokrasi yaitu :

1. Tingginya angka partisipasi masyarakat.
2. Tingginya angka partisipasi masyarakat itu tentunya berimbang atau beriringan dengan tingginya atau meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak politik dalam memilih pemimpin.
3. Pemahaman penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan regulasi.
4. Pelaksanaan pesta demokrasi yang tertib aman dan lancar
5. Dukungan pemerintah daerah terhadap kesuksesan dan kelancaran pesta demokrasi dan hal hal lain.

Namun hal yang lebih penting lainnya bagi penyelenggara Pilkada adalah bagaimana angka partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dari Pilkada ke Pilkada. Karena Samarinda sebagai ibukota Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang lebih dominan atau lebih besar di banding kabupaten kota daerah lain di Kalimantan Timur ditambah lagi tingkat apatisme masyarakat untuk menggunakan hak pilih di dalam pelaksanaan pesta demokrasi

tentunya menjadi tantangan berarti dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting karena menjadi tonggak dari sebuah pilar terlaksananya pesta demokrasi semakin banyak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi maka sukseslah pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Beberapa strategi yang KPU Kota Samarinda lakukan bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda yaitu :

1. Memaksimalkan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih. Dimana KPU Kota Samarinda melaksanakan perintah KPU RI untuk membentuk relawan demokrasi untuk mendorong dan meningkatkan angka pemilih salah satunya dengan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Meluncurkan Aplikasi Siwaksut yang berbasis android.
3. Kerjasama dengan kampus
4. Sosialisasi melalui media sosial, dan lainnya

3. Wawancara dengan PPK

Wildan Saugi,M.Pd, Suardi Sagama,M.Hum, Ahmad Nur Kholis dan M.Ali Somba. Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih diantaranya adanya kesadaran masyarakat terhadap pemimpin di daerah, adanya peran serta masyarakat untuk memajukan daerah dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada . Adanya sosialisasi terkait pemilu untuk masyarakat, faktor

figur yang dipilih, jarak TPS dengan Rumah, waktu Pilkada, dan calon yang berkompetisi.

Dan faktor yang menyebabkan warga tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) karena banyak warga yang pindah domisili tapi tidak memilih di tempat asal KTP, lebih memilih bekerja daripada datang ke TPS, kurang peduli dengan siapa pemimpin yang akan memimpin Kota Samarinda.

Sosialisasi yang diadakan KPU diantaranya uji publik, simulasi serentak di GOR Segiri, dan lain-lain. Sosialisasi standar kesehatan covid 19 di TPS juga sudah dilaksanakan pada saat bimtek. Dan sosialisasi juga sudah dilaksanakan dengan maksimal baik melalui media *online* maupun pertemuan pertemuan *offline*. Lokasi TPS juga di pilih lokasi yang mudah dicapai warga dengan dengan melihat kondisi geografis pemilih. Menurut bapak Wildan Saugi, M.Pd strategi yang dilakukan PPK untuk meningkatkan partisipasi pemilih di saat pandemi dengan mensosialisasikan secara gencar melalui media *online* dan melaksanakan pertemuan dengan RT melalui fasilitasi dari Lurah.

1. Wawancara dengan PPS

Adi Pratama Nur, SH, Didik Ratulidi, Sherli Nursija dan Mulyadi Basri PPS yang bertugas dalam Pilkada.

Faktor - Faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi memilih adalah karena adanya sosialisasi Pilkada yang diberikan kepada warga , solidaritas dan koordinasi antara PPK dan PPS, Pasangan Calon (Paslon) yang memprioritaskan sosialisasi ke warga, kesadaran bahwa memilih pemimpin itu hal yang penting karena nantinya akan berpengaruh terhadap masyarakat, dan ada juga segelintir orang yang memilih karena adanya imbalan dari pasangan calon tertentu.

Adapun faktor yang mempengaruhi warga untuk tidak datang ke TPS diantaranya banyaknya masyarakat luar yang tidak bisa memilih dan banyaknya masyarakat yang masih berusia muda yang tidak percaya terhadap Paslon. Pindah rumah sehingga tidak mendapat surat undangan untuk memilih menjadi salah satu faktor tidak memilih, minimnya kampanye dari kontestan para calon, adanya sikap masa bodoh dari warga. Untuk sosialisasi Pilkada ada dilaksanakan di kecamatan dan dilakukan simulasi cara memilih.

Berkaitan dengan sosialisasi standar kesehatan covid-19 di TPS H-2, H-1 Petugas Pilkada menyediakan tempat dan standar kesehatan di TPS, sosialisasi di TPS sangat Baik yang diikuti oleh Relawan Demokrasi dari KPU Kota Samarinda.

Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 oleh penyelenggara sudah berjalan dengan baik baik yang dilakukan melalui media sosial maupun yang dilakukan secara langsung melalui masjid dan tempat umum lainnya. Lokasi

TPS pun dimaksimalkan di tempat yang dekat dan mudah diketahui masyarakat.

Strategi yang dilakukan PPS dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi yaitu melibatkan sosial media dan tenaga muda dijadikan partisipan Pilkada, menginformasikan ke masyarakat lewat masjid / tempat umum yang bisa digunakan, memanfaatkan peran RT/Lurah untuk membantu mensosialisasikan.

2. Wawancara dengan Kandidat Calon dan Tim Pemenangan

Rusmadi Wongso, Menjelaskan "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 pada masa pandemi adalah harapan warga akan perubahan menuju Samarinda yang lebih baik, dan Strategi Efektif Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Samarinda adalah dengan bertemu langsung dengan warga dan sosialisasi Pilkada kota Samarinda sudah dilakukan oleh KPU Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda (Instansi Pemkot/Dinas/Kecamatan/Kelurahan), Lainnya. Dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ke depannya adalah dengan *door to door* mendatangi warga"

Sedangkan Sarwono Menjelaskan "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 pada masa pandemi adalah Keinginan masyarakat untuk hadirnya pemimpin yang lebih dekat dengan masyarakat, bisa memahami kondisi permasalahan masyarakat dan membantu solusi permasalahan masyarakat untuk membawa

perubahan yang lebih baik. Dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ke depannya adalah dengan Interaksi dengan masyarakat baik langsung maupun melalui berbagai media. Mendengarkan apa harapan masyarakat, bertukar pikiran, memberikan wacana solusi dan mengajak bersama untuk melakukan perubahan dengan ikut berpartisipasi"

Fahrizal Helmi Hasibuan, Tim Pemenangan Badar menyatakan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 pada masa Pandemi adalah finansial, hubungan kekerabatan dan publikasi/sosialisasi. Dan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan Pilkada ceria diantaranya TPS dijadikan meriah, tersedia kuliner dan hiburan jadi ada daya tarik pemilih karena hari pemungutan libur aktivitas.

Rizal, Tim Kemenangan Zairin- Sarwono, menjelaskan "Factor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 pada masa pandemi adalah Figur yg populis, Politik uang dan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pilkada, dan Strategi Efektif Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Samarinda adalah Peraturan yang memperluas partisipasi calon dari semua lapisan masyarakat, dan Pilkada JURDIL. Sosialisasi Pemilih Pada Pilkada Kota Samarinda telah dilakukan oleh KPU Kota Samarinda dan pengurus Rukun Tetangga (RT). Cara yang Efektif Meningkatkan Partisipasi Pemilih Salah satunya mewujudkan mekanisme digital / e voting pencoblosan / pemungutan suara"

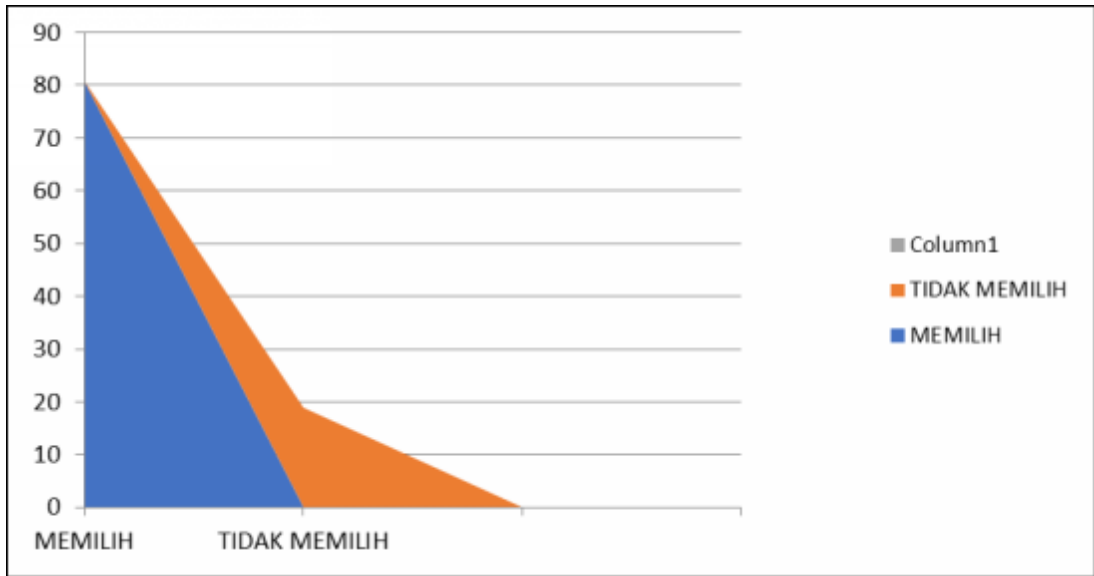
3. Wawancara Pemerintah Kota Samarinda (Kesbangpol)

Pilkada Serentak Kota Samarinda Tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2015 hal ini karena meningkatnya kesadaran warga untuk menggunakan hak pilihnya. Pada Pilkada Tahun 2020, Kesbangpol bagian dari pemerintah daerah juga ikut melakukan sosialisasi dengan melakukan pendidikan politik terutama kepada sekolah sekolah SMA untuk mengenalkan Pilkada kepada pemilih pemula dan sosialisasi ke perguruan tinggi. Kesbangpol juga mensosialisasikan ke masyarakat ke kecamatan kecamatan dan yang Kesbangpol sosialisasikan adalah pasangan pasangan calon peserta Pilkada.

4. Wawancara dengan warga masyarakat

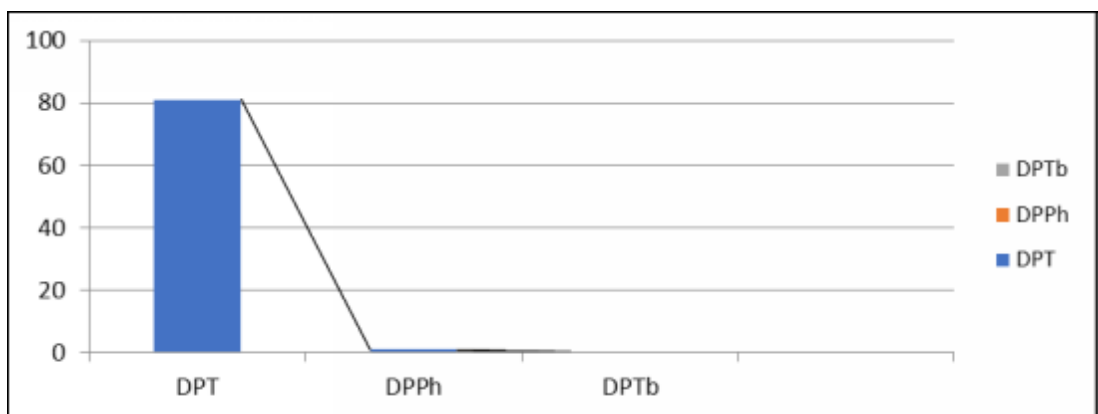
Partisipasi warga dalam Pilkada Kota Samarinda pada tahun 2020 mengalami kenaikan walaupun tidak banyak, 2 % dari Pilkada Tahun 2015. Dari wawancara peneliti kepada respondenpun terlihat jumlah responden yang turut serta memilih juga sudah cukup banyak.

Grafik 4.2
Responden yang menggunakan hak suaranya dan yang tidak menggunakan hak suaranya.



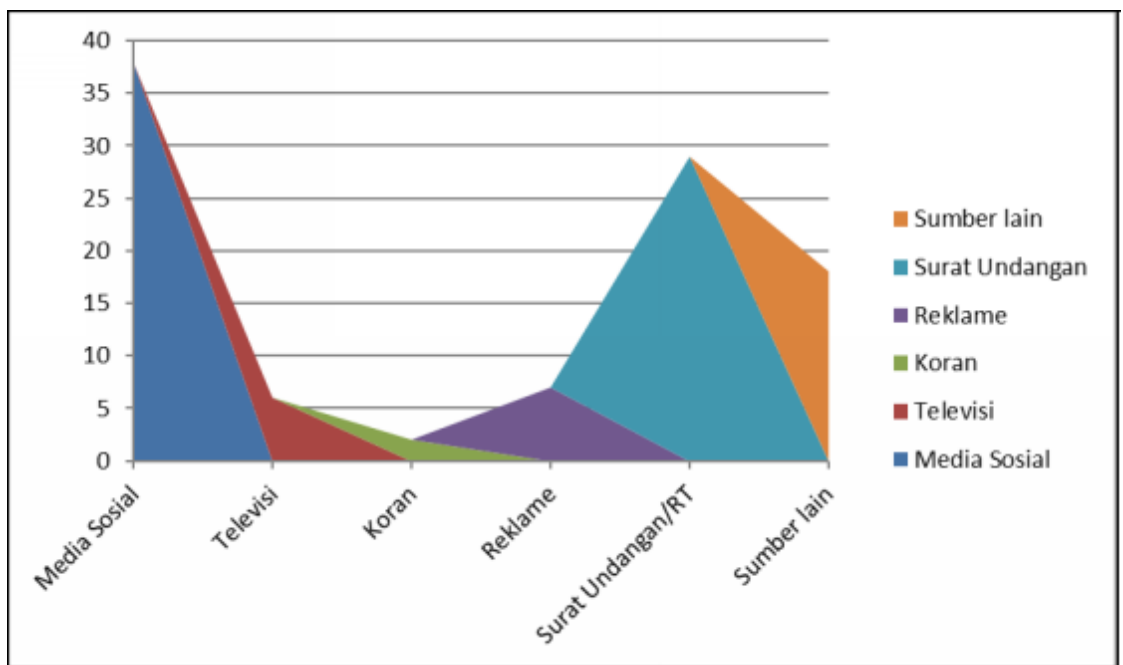
Dari 100 orang responden (masyarakat) yang peneliti wawancarai 81 % menggunakan hak pilihnya dan sebanyak 19 % tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagian besar warga memilih berpartisipasi dalam Pilkada dengan menggunakan jalur DPT.

Grafik 4.3
Grafik Kategori Pemilih



Dari 81 orang responden yang memilih di TPS 80 orang masuk Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 1 orang yang masuk kategori Daftar pemilih pindahan (DPPH). Sebagian besar warga mengetahui pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 dari sosialisasi yang di lakukan KPU dan Tim Kampanye. kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda melalui berbagai sumber sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.4
Sumber Informasi Pilkada Kota Samarinda

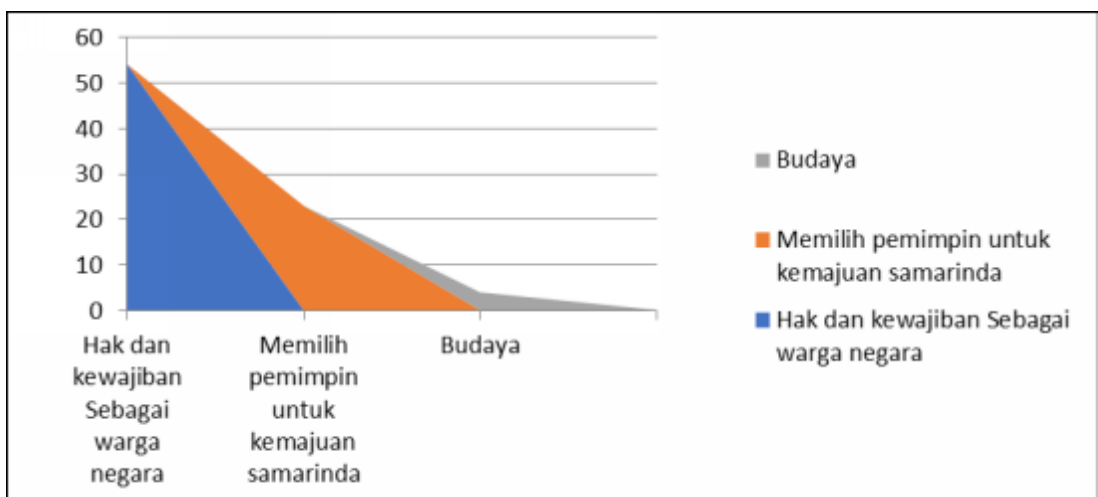


Dari keselsuruhan responden yang peneliti wawancarai 38% responden mengetahui tanggal pelaksanaan Pilkada dari media sosial, 29 % mengetahui tanggal pelaksanaan Pilkada dari surat undangan yang di bagikan ketua RT, 7 % responden mengetahui pelaksanaan pemilu dari reklame ataupun spanduk yang dipasang di jalan jalan, sebanyak 6 % responden mengetahuinya dari televisi dan

sebanyak 2 % mengetahui dari Koran atau media massa dan sisanya sebanyak 18% mengetahui dari sumber lain. Sumber lain ini yaitu tetangga, anak ataupun orang tua responden.

Dari sini jelas terlihat sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang paling banyak menyentuh masyarakat adalah melalui media sosial baik itu whatsapp, facebook, instagram maupun melalui twitter. Sosialisasi yang telah dilaksanakan berimbas pada partisipasi warga. Partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada sangat penting guna kesuksesan pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Ada banyak alasan dibalik turut sertanya seseorang memilih dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020 seperti terlihat dalam grafik .

Grafik 4.5
Alasan Warga Berpartisipasi dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020



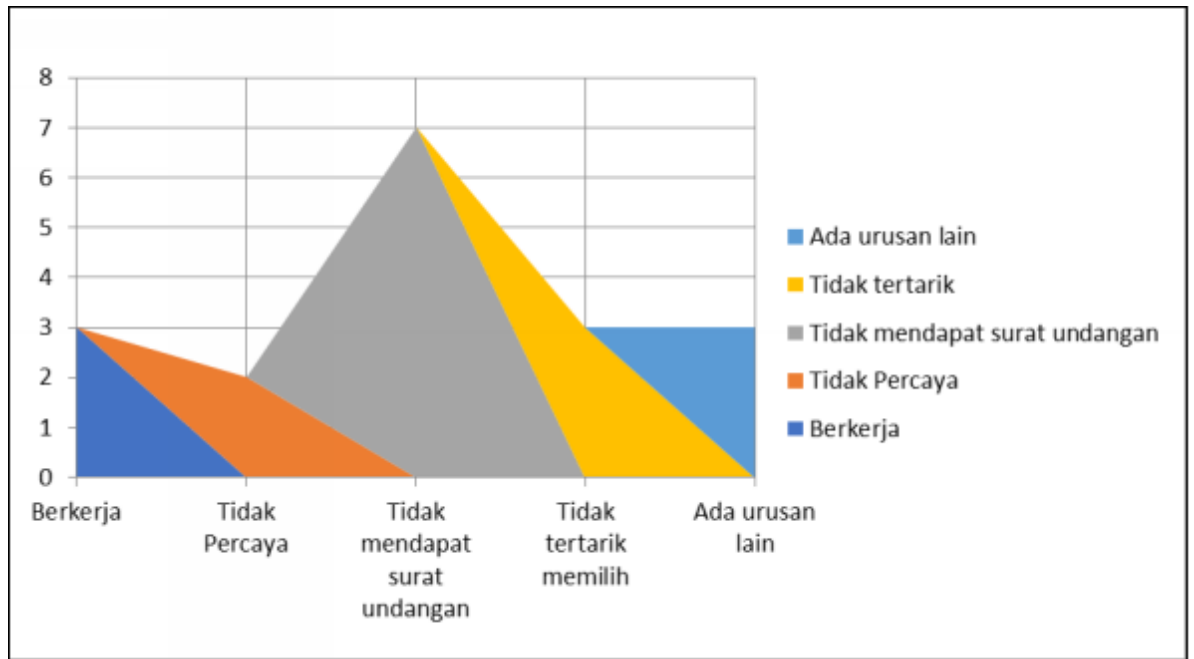
66,7 % masyarakat turut serta berpartisipasi memilih dalam Pilkada karena ingin agar haknya sebagai warga Negara terpenuhi dengan turut berpartisipasi memilih calon kepala daerah dan sebanyak 28,4% turut berpartisipasi memilih dalam Pilkada karena kepedulian terhadap Kota Samarinda dan ingin mendapatkan

pemimpin yang lebih baik yang membangun Kota Samarinda sehingga lebih baik dan lebih maju lagi. Faktor budaya pun tidak luput, 4,94 % masyarakat memahami bahwa turut serta datang ke TPS itu sebuah budaya yang baik merasa malu dengan kawan atau tetangga jika tidak turut serta memilih. Meskipun rendah faktor budaya ini harus kita tingkatkan kedepannya, agar saat seseorang tidak memilih (golput) mereka akan merasa malu dan tidak merasa bangga bahkan mengkampanyekan untuk memilih (tidak Golput).

Dalam sebuah Pilkada, Golput sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dalam Pilkada Serentak Kota Samarinda Tahun 2020 tingkat golput di Kota Samarinda cukup tinggi meskipun tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan dari Pilkada sebelumnya tahun 2015 sebesar 49,17 % dan pada Pilkada Serentak Kota Samarinda Tahun 2020 ini tingkat partisipasi warga meningkat sebanyak 2 % menjadi 51,86 %. Ada beberapa alasan warga untuk tidak datang ke TPS saat Pilkada Serentak Kota Samarinda Tahun 2020.

Grafik 4.6

Alasan Tidak berpartisipasi Dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020

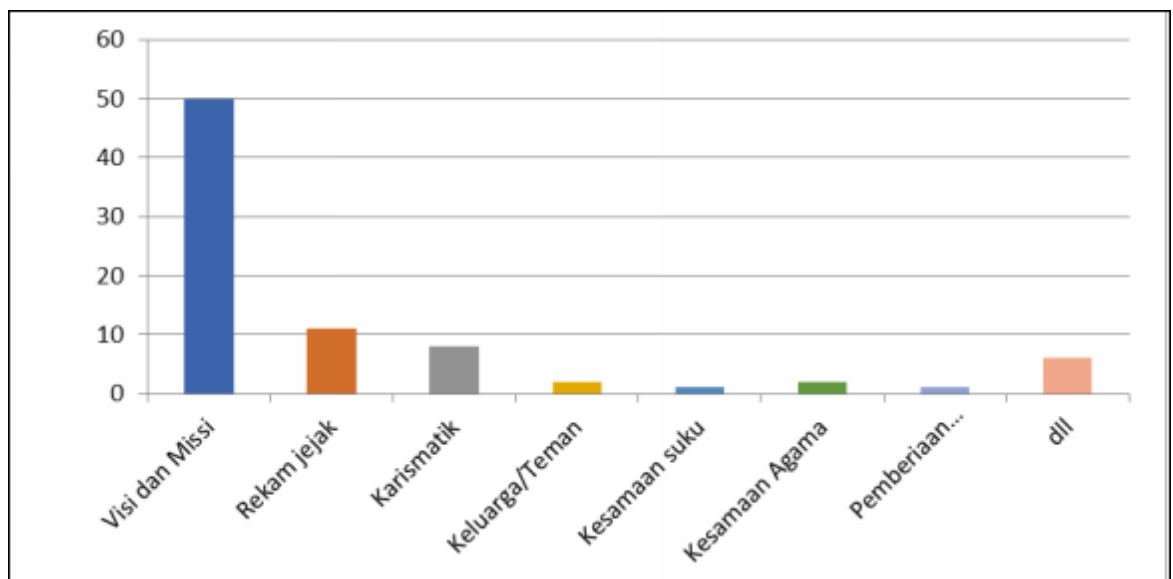


Dari keseluruhan responden yang di wawancarai peneliti ada 19 % tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagian besar responden yang tidak menggunakan hak pilihnya ini karena tidak mendapat undangan memilih. Mereka tidak mendapat undangan memilih karena perpindahan domisili tempat tinggal di mana alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), responden yang tidak memilih karena tidak mendapat undangan ini sebanyak 36,8 %. Sebanyak 15,8 % dari responden tidak memilih karena memilih bekerja mencari nafkah baik itu berjualan maupun pekerjaan lain yang tidak mungkin di tinggalkan, sebanyak 15,8% responden tidak memilih karena tidak tertarik untuk memilih dan 15,8 % lainnya lebih mengutamakan urusan lain

sedangkan sisanya tidak memilih karena tidak percaya Pilkada dapat membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk kota Samarinda.

Dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020 ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Ada berbagai alasan warga dalam memilih para kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini

Grafik 4.7
Alasan Warga Memilih Kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pilkada Tahun 2020



Dari hasil wawancara peneliti dengan responden 61,7 % responden memilih karena visi dan misi kandidat, 13,6% responden memilih kandidat karena rekam jejak, sebanyak 9,9 % responden memilih kandidat karena karismatik dan sisanya ada yang memilih karena hubungan keluarga/teman, kesamaan suku, kesamaan agama dan ada juga yang memilih kandidat karena adanya pemberian baik dari Tims Sukses maupun dari pasangan calon.

Dari hasil wawancara 66 % responden mengetahui visi dan misi kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota dan sisanya sebanyak 34 % tidak mengetahui

visi dan misi kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Ini menunjukkan masih kurang maksimalnya sosialisasi atau kampanye dari para calon pemimpin Kota Samarinda. Sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.8. Visi dan Misi calon Walikota dan Wakil Walikota

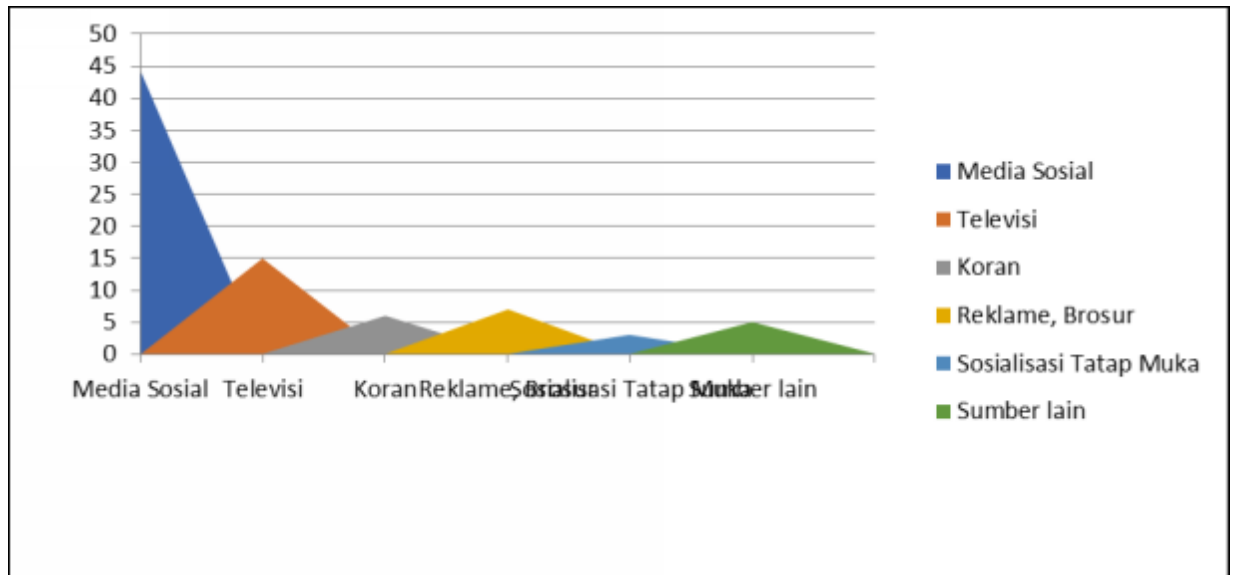


Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020 yang terjadi pada masa pandemi covid -19 tidaklah berjalan mudah para penyelenggara Pilkada harus memastikan keamanan bagi warga yang memilih dan juga keamanan bagi petugas Pilkada agar terhindar dari virus covid-19. Untuk keamanan dan kenyamanan agar warga tidak takut datang ke TPS dan para petugas pun tenang dalam bertugas sosialisasi keamanan dan standar kesehatan covid-19 harus dilakukan. Dari keseluruhan responden sebagian besar mengetahui sosialisasi tersebut, dimana sebanyak 82 % mengetahui sosialisasi keamanan dan standar kesehatan covid 19 di TPS hanya 28 % yang tidak mengetahui sosialisasi tersebut.

Sosialisasi keamanan dan standar kesehatan covid-19 sebagian besar diketahui warga melalui media sosial baik itu whatsapp, facebook, instagram maupun media sosial lainnya. Media televisi, reklame, brosur dan Koran juga

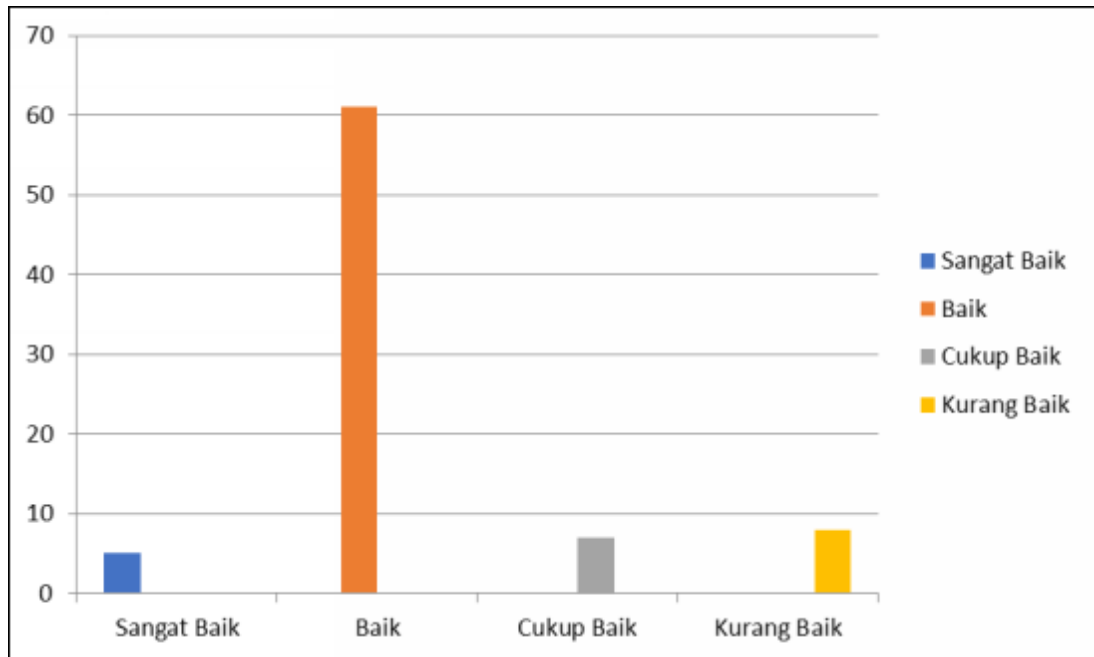
cukup membantu tersosialisasikannya keamanan dan standar kesehatan covid 19 di TPS.

Grafik 4.9
Media Informasi Sosialisasi Keamanan dan Standar Kesehatan Covid – 19 di TPS



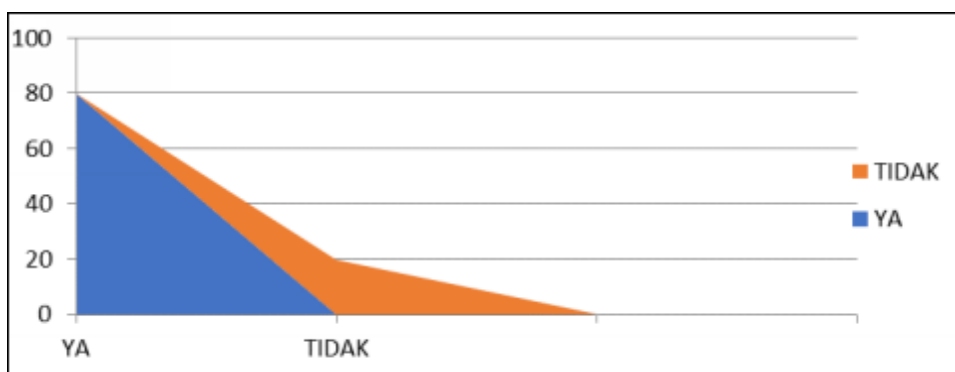
Menurut Sebagian besar responden sekitar 75 % menilai pelaksanaan sosialisasi standar kesehatan covid -19 di TPS sudah baik, 6,2 % responden bahkan menilai sangat baik hal itu dapat dilihat dari warga yang datang ke TPS menggunakan masker, warga tidak bergerombol, di TPS disediakan tempat mencuci tangan, *hand sanitizer*, dan warga sebelum memilih di periksa dulu suhu badannya oleh petugas yang juga selalu menjaga kesehatan dengan tidak lupa memakai masker dan menggunakan sarung tangan.

Grafik 4.10
Tingkat Keberhasilan Sosialisasi Keamanan dan Standar Kesehatan Covid-19 di TPS



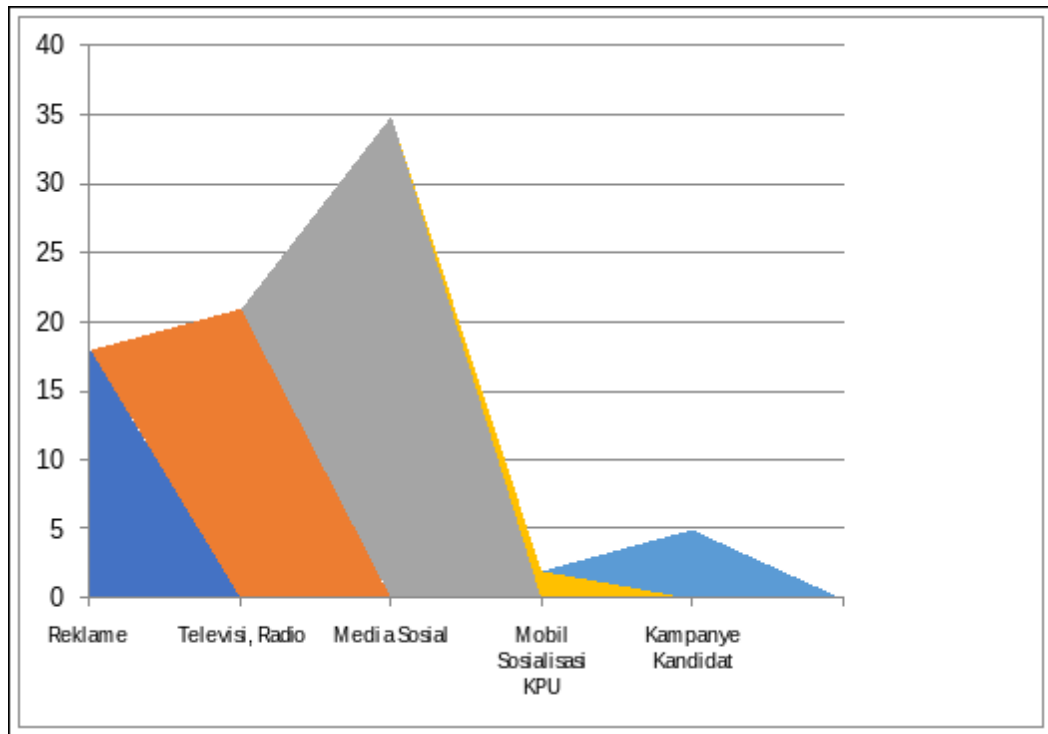
Kesuksesan sebuah pesta demokrasi salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya warga yang mengetahui kegiatan tersebut, untuk itu sosialisasi penting dilakukan yang pada akhirnya bermuara pada tingkat partisipasi pemilih. Sebanyak 80 % responden sudah melihat atau mendengar tentang sosialisasi Pilkada Kota Samarinda yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan sebanyak 20 % responden yang tidak pernah melihat atau mendengar sosialisasi Pilkada Kota Samarinda .

Grafik 4.11
Tingkat Pengetahuan warga Terhadap sosialisasi Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020



Dari hasil wawancara kepada responden sebanyak 43,75 % responden melihat atau mendengar sosialisasi Pilkada Kota Samarinda 2020 dari media sosial . Sebanyak 26,25 % mengetahui sosialisasi Pilkada melalui media televisi dan radio dan sebanyak 21,25 % responden mengetahui sosialisasi Pilkada Kota Samarinda melalui reklame atau spanduk yang dipasang di pinggir pinggir jalan dan sebagian lagi sebanyak 6,25 % responden mengetahui melalui kampanye kandidat secara tatap muka langsung dan sebanyak 2,5 % warga yang mengetahui Pilkada karena melihat mobil sosialisasi Pilkada milik KPU Kota Samarinda.

Grafik 4.12
Media Sosialisasi Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020

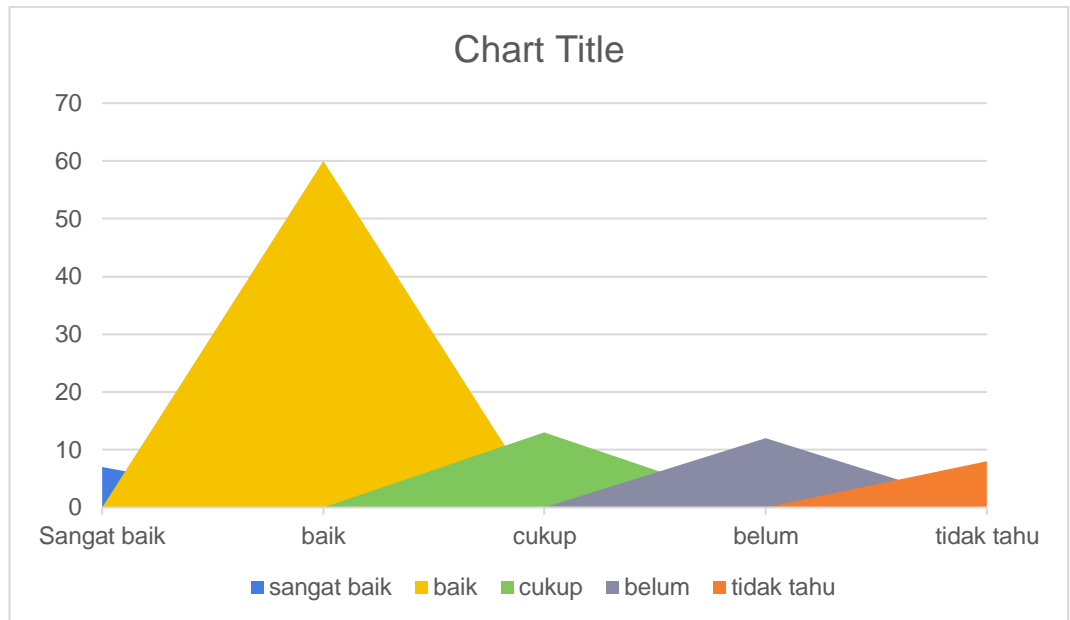


Dengan adanya sosialisasi Pilkada tahun 2020 diharapkan tingkat partisipasi pemilih meningkat di banding Pilkada Tahun 2015. Menurut sebagian warga atau 7 % responden menilai sosialisasi Pilkada yang di lakukan penyelenggara Pilkada sudah berlangsung dengan sangat baik, 60 % responden menilai sosialisasi Pilkada yang di lakukan penyelenggara Pilkada sudah berlangsung dengan baik karena berkat sosialisasi yang dilakukan mereka jadi tahu kapan pelaksanaan Pilkada dan siapa saja calon yang bisa mereka pilih. Dan yang menilai sosialisasi Pilkada yang diselenggarakan penyelenggara Pilkada Kota Samarinda Kurang Baik hanya 12%. Sebanyak 13 % menilai sosialisasi yang dilakukan cukup baik Serta yang tidak tahu tentang sosialisasi Pilkada Kota Samarinda hanya sejumlah 8 % dari responden. Dan untuk memudahkan warga menuju TPS dalam memilih pada

Pilkada Tahun 2020 letak TPS dibuat tidak jauh dari kediaman warga sehingga mudah dicapai oleh warga.

Grafik 4.13

Tingkat Sosialisasi Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020



4.3.2. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada di tengah pandemi di Kota Samarinda

Pilkada seraca langsung Walikota dan Wakil Walikota dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk menggunakan hak politiknya, terjaminnya pergantian kepemimpinan secara damai meningkatkan kesejahteraan dan dan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah proses demokrasi artinya masyarakat harus mengerti pentingnya ikut

berpartisipasi dan masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Samarinda merupakan salah satu dari 9 Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Meski dalam masa Pandemi Covid-19 Pilkada Kota Samarinda mengalami kenaikan jumlah partisipasi pemilih sebanyak 2 %. Pada Pilkada Tahun 2015 jumlah Partisipasi pemilih sebesar 49,17 % sedangkan pada Pilkada Tahun 2020 ini jumlah Partisipasi pemilih meningkat menjadi 51,86 %.

Dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020 ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih dalam Pilkada di tengah pandemi ini yaitu

1. Faktor sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi. Sosialisasi Pilkada yang mayoritas dilakukan secara daring melalui media sosial lebih mudah ditangkap sebagian besar masyarakat yang dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari tidak lepas dari smartphone.
1. Faktor politik. Kesadaran politik masyarakat semakin meningkat hal itu ditandai dengan semakin banyaknya warga yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara untuk itu warga menggunakan hak suaranya untuk memilih calon kepala daerah. Dan masyarakat juga ingin memilih pemimpin yang dapat meningkatkan kemajuan daerahnya.

2. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan, menempatkan TPS yang berdekatan dengan kediaman warga sehingga memudahkan warga untuk datang ke TPS serta adanya jaminan keamanan sesuai standar kesehatan covid – 19 di TPS yang membuat warga tidak perlu ragu untuk datang ke TPS.
3. Faktor Nilai Budaya Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi. Budaya malu jika tidak turut serta memilih dalam Pilkada dan Saling mengingatkan sesama warga (tetangga) untuk datang ke TPS merupakan nilai budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan agar mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Dan adanya kebiasaan dari timses / kandidat memberi sesuatu kepada warga sehingga warga datang ke TPS untuk memilih nya. Hal ini merupakan sebuah budaya yang selalu ada dalam setiap Pilkada yang tidak bagus tetapi budaya ini sulit dihilangkan.

4.4. Strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda Untuk Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada di tengah pandemi.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 yang melanda, KPU Kota Samarinda gencar melakukan sosialisasi meskipun sebagian besar sosialisasi tidak dapat dilakukan secara tatap muka atau langsung melainkan harus dilakukan secara *online* atau daring. Berikut sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020.

1. Sosialisasi Pilkada melalui program relawan demokrasi yang dilaksanakan oleh 10 Basis Pemilih dan masing-masing basis pemilih menyusun dan melaksanakan kegiatan inti, kegiatan kreatifitas dan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama.
2. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dalam bentuk tatap muka.
3. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode Lomba, yaitu lomba mural, lomba cerdas cermat daring dan lomba lainnya.
4. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan mengikuti pameran Ekspo Kaltim 2020.
5. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode daring
6. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda melalui media Televisi, Radio, dan media cetak.
7. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode peluncuran dan sosialisasi aplikasi Si Waksut, aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Pilkada.
8. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode pemasangan Baliho pada titik-titik strategis dalam kota.
9. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode pengadaan Souvenir, berupa Boneka Si Waksut (Maskot), Baju Kaos, payung, cangkir, gantungan kunci, PIN, pulpen, jam dinding.

10. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode mencetak dan membagikan Brosur, leaflet.
11. H-1 Pemungutan suara melaksanakan sosialisasi mobile keliling kota.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak di tengah pandemi covid-19

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda tahun 2020 mengalami peningkatan di bandingkan Pemilihan tahun 2015. Pada Pilkada serentak Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2015 jumlah partisipasi pemilih ada 49,17 % dan partisipasi pemilih pada Tahun 2020 ada 51,86 %

Dalam Pilkada serentak Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2020 ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih di tengah pandemi covid-19 ini yaitu

1. Faktor sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi. Sosialisasi Pemilihan yang mayoritas dilakukan secara daring melalui media sosial lebih mudah ditangkap sebagian besar masyarakat yang dalam pekerjaan dan kehidupan sehari hari tidak lepas dari smartpone.

2. Faktor politik. Kesadaran politik masyarakat semakin meningkat hal itu ditandai dengan semakin banyak warga menggunakan hak pilihnya karena kesadaran, memilih calon kepala daerah sebagai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan masyarakat juga ingin memilih pemimpin yang dapat meningkatkan kemajuan Kota Samarinda.
3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan, menempatkan TPS yang berdekatan dengan kediaman warga sehingga memudahkan warga untuk datang ke TPS serta adanya jaminan keamanan sesuai standar kesehatan covid – 19 di TPS yang membuat warga tidak perlu ragu untuk datang ke TPS.
4. Faktor Nilai Budaya. Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi. Budaya malu jika tidak turut serta memilih dalam Pemilihan dan saling mengingatkan sesama warga (tetangga) untuk datang ke TPS merupakan nilai budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan agar mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Adanya kebiasaan dari timses/ kandidat memberi sesuatu kepada warga sehingga warga datang ke TPS untuk memilih, hal ini merupakan sebuah budaya yang selalu ada dalam setiap pemilihan.

2. Strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda Untuk Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan yang dilakukan ditengah pandemi covid-19 yang melanda KPU kota Samarinda

gencar melakukan sosialisasi meskipun sebagian besar sosialisasi tidak dapat dilakukan secara tatap muka atau langsung melainkan harus dilakukan secara *online* atau daring. Berikut sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kota Samarinda Tahun 2020.

1. Sosialisasi Pilkada melalui program relawan demokrasi yang dilaksanakan oleh 10 Basis Pemilih dan masing-masing basis pemilih menyusun dan melaksanakan kegiatan inti, kegiatan kreatifitas dan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama.
2. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dalam bentuk tatap muka.
3. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode Lomba, yaitu lomba mural, lomba cerdas cermat daring dan lomba
4. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan mengikuti Pameran ekspo Kaltim 2020.
5. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode daring
6. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda melalui media Televisi, Radio, dan media cetak.
7. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode peluncuran aplikasi sosialisasi Si Waksut.
8. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode pemasangan Baliho pada titik-titik strategis dalam kota.

9. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode pengadaan Suvenir, berupa Boneka Si Waksut (Maskot), Baju Kaos, payung, cangkir, gantungan kunci, PIN, pulpen, jam dinding.
10. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dengan metode mencetak dan membagikan Brosur, leaflet.
11. H-1 Pemungutan suara melaksanakan sosialisasi mobile keliling kota.

4.2 SARAN

1. Kepada masyarakat, supaya kiranya tidak menjadikan uang sebagai faktor partisipasi dalam Pilkada atau faktor untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam ajang Pilkada
2. Terhadap peserta pilkada, baik pasangan calon maupun partai politik supaya terus menerus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi aturan-aturan pemilihan umum.
3. Untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi pemilih dalam Pilkada yang akan datang masyarakat Samarinda yang memiliki KTP namun tidak mendapat undangan karena persoalan domisili hendaknya diberi waktu lebih panjang untuk bisa memilih di TPS terdekat tempat domisilinya.
4. Lebih meningkatkan peran RT untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada terhadap warga di lingkungannya, terutama warga yang memiliki KTP tapi tidak sesuai domisili alamat tempat tinggal sekarang, agar bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.
5. Untuk internal KPU Kota Samarinda agar terus menerus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan

6. Terhadap pemerintah, supaya kiranya mempersiapkan pembuatan peraturan- peraturan pemilihan dengan lebih matang sehingga kedepan peraturan perundang- undangan pemilihan kita lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Almond, Gabriel and Verba, Sydney. 1963. *The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown and Company.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri. 2006. *Pemilihan Langsung: Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino,Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Amrizal, Dedi, Ahmad Hidayat Dalimunthe dan Yusriati. 2018. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Aspar, Muhammad. 2006. *Mendesain Manajemen Plkada Panduan Bagi Stakeholders*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Delton, Ginger L. 2016. *Political Participation in Asia Typologies of Political Behavior Across Democrating States*. USA: Word Scientific.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta:Obor Indonesia.
- Halim, Rahmawati dan Muhlin Lalongan. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*. Makassar: Sah Media.
- Haryono, Dwi. 2016. Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Tesis Magister*. Universitas Mulawarman.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim,Amin. 2013. *Dinamika Politik Lokal Konsep dan Implem*. Bandung: Masdar Maju.

- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang:Intrans Publising.
- Rush, Michael dan Philip Althoff . 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Masyaakat Multikultur*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Schumpeter, J. 1942. *Capitalism, Sosialism and Democracy*. New York: Harper
- Stipu, P. Antonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Suriyanto, Panji. 2018. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Karo 2015. *Tersi Magister*. Universitas Sumatera Utara.
- Maliki, Zanuddin. 2016. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadja Mada University Press.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Melfa, Wendy. 2020. *Menakar Demokrasi Dalam Pandemi*. Yogyakarta:Noktah.
- Milbrath, Lester W. and Goel M.L. 1977. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago: Rand McNally
- Venus, Antar. 2009. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Warjito. 2020. *Demokrasi Di Era Covid-19: Isu, Persoalan dan Rekomendasi*. Medan: Gerhana Media Kreasi.
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. 2020. *Perilaku Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Wijayanto, dkk. 2021. *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi : Refleksi 2020; Outlook 2021*. Depok: LP3ES.

Jurnal :

Arif, Mokhammad Samsul. 2020. "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (Journal Electoral Governance)*, 2(1),18-40.

James, T. S., Garnett, H. A., James, T. S., & Garnett, H. A. 2019. "Introduction : the case for inclusive voting practices Introduction : the case for inclusive voting practices". *Policy Studies*, 0(0), 1–18.

Meyliana, Inggried FenadanDewi Erowati. 2020. "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) Tahun 2020". *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168-181.

Pratama, Heroik Mutaqin. 2017. "Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia". *Jurnal Analisis CSIS*, 46(4), 440-457.

Dokumen :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. 2021. *Evauasi dan Pelaporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota Samarinda.* Komisi Pemilihan Umum, Samarinda.128 hal.

Sumber Internet :

Nua, Faustinus. 2020. "Pemilihan 2020, KPU Target 77,5% Partisipasi Pemilih Media Indonesia, (Online), (<https://mediaindonesia.com>, diakses 12 April 2021)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2021. "Siaran Pers: Tingkat Partisipasi Pemilihan 2020 Mencapai 76,09 Persen" (Online),

(https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Rilis_Tingkat_Partisipasi_Pemilih_di_Pemilihan_2020_Revisi_7_Jan.pdf, diakses 12 April 2021)

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SAMARINDA
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Model
 KEM/KEM/KOTA
 14/16/2014
 Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (semua dengan hasil perhitungan pada	593117
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelemban/teroblos	659
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	290893
4	Jumlah surat suara yang digunakan	301555

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	3
1	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
A.	MUHAMMAD BARRATI	83243
2	Dr. H. ANDI HARUN	102592
3	Dr. Ir. H. ZAIRIN ZAINI, M.Si	99245
B.	JUMLAH SUARA SAH	284080
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	17475
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	301555

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA



Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 17 Desember 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA,

FIRYAN HIDAYAT

td.